

Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Disease (Covid -19) Di Provinsi Gorontalo

Rizka Yunika Ramly¹ Shella Budiawan²✉

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi sistem penyaluran dana bantuan sosial akibat covid-19 serta ketetapan bagi masyarakat layak penerima dana bantuan yang terdampak covid-19. Adapun tahapan penelitian yang digunakan dengan melakukan survey dan wawancara ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selain itu melakukan tinjauan langsung ke lapangan saat pencairan dana BantuanLangsung Tunai (BLT) senilai Rp.600ribu di Kantor Pos. Hasil penelitian menyatakan sesuai dengan tanggapan dan gambaran kondisi di lokasi penelitian bahwa sistem penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo dalam hal ini yang mengelola adalah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dinyatakan sudah sesuai prosedur ketetapan sebenarnya, adapun untuk kriteria masyarakat penerima bantuan sudah sesuai kriteria namun yang menjadi kendala adalah kesesuaian data masyarakat yang tidak menyertakan data berkas sesuai syarat yang harus dilengkapi sehingga data tidak dapat diproses.

Kata Kunci: *Analisis; Pengelolaan Keuangan; Dana Bantuan Covid-19.*

Abstract

This study aims to assess and identify the distribution system for social assistance funds due to COVID-19 and provisions for eligible communities to receive aid funds affected by COVID-19. The stages of the research used were surveys and interviews with the Gorontalo Provincial Social Service and conducting direct field observations when disbursing cash assistance (BLT) worth Rp.600 thousand at the Post Office. The results of the study stated that according to the response and description of the conditions at the research location, the system for distributing aid funds carried out by the Gorontalo provincial government, in this case, the Gorontalo Provincial Social Service, was declared to have complied with the actual stipulation procedure, as for the criteria for the recipient community, it was following the criteria, but the problem is the suitability of community data that does not include file data according to the requirements that must be completed so that the data cannot be processed.

Keywords: *Analysis; Financial Management; Covid-19 Relief Fund.*

Copyright (c) 2021 Rizka Yunika Ramly & Shella Budiawan

✉ Corresponding author :

Email Address : shellsaktx2018@gmail.com

PENDAHULUAN

Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dimulai sejak april 2020 berupa uang tunai maupun bantuan bahan sembako merupakan Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19 masih menimbulkan persoalan hingga kini. Berbagai aduan terkait bansos disampaikan warga kepada Ombudsman RI yang membuka pengaduan khusus warga terdampak Covid-19. Sejak 29 April 2020, terdapat 817 aduan warga yang berkaitan dengan bansos dari total 1.004 pengaduan yang masuk. Permasalahan pendataan bansos covid-19 yang membuat penyalurannya tak tepat sasaran salah satunya terungkap saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Banten. Temuan di lapangan menunjukkan Pegawai Negeri Sipil hingga anggota dewan terdapat menjadi penerima bansos. Selain itu, beberapa hal juga terungkap karena dana bantuan ini cenderung lambat penyalurannya dikarenakan jarak antar pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dari sistem regulasi pemberian bantuan, adapun sistem yang berjalan seperti pendeteksian KTP yang tidak valid karena masyarakat yang bersangkutan teridentifikasi datanya bertempat tinggal di suatu daerah namun tinggal dan berkerja di daerah lain.

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan sejumlah program bantuan, salah satunya ialah bantuan pangan bersubsidi secara gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ada beberapa jenis bantuan yang disalurkan bagi masyarakat terdampak covid-19 di Gorontalo, antara lain bantuan yang bersumber langsung dari pemprov Gorontalo dan kabupaten yaitu bantuan pangan senilai Rp.55ribu, selain itu ada bantuan yang bersumber dari dana bakti sosial NKRI peduli yang berupa bantuan pangan pokok bersubsidi yang melibatkan kerjasama antar dinas sosial, dinas kumperindag, dan baznas provinsi Gorontalo yang diambil dari hasil zakat ASN Pemprov Gorontalo senilai 2,5% dari gaji mereka, dan adapun bantuan yang disalurkan yang bersumber dari pemerintah pusat ialah dana bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp.600ribu melalui kemensos bagi 60ribu warga masyarakat wilayah provinsi Gorontalo.

Upaya dalam pelaksanaan penyaluran secara tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan telah dilakukan oleh segenap jajaran pihak-pihak yang bersangkutan, namun tindakan ini tetap saja menjadi kontroversi karena masih terjadi kesejangan informasi antar pihak pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukannya penelusuran lebih lanjut sistem tentang penyaluran dana bantuan masyarakat dampak covid-19 ini di wilayah provinsi gorontalo. Dana bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 merupakan angin segar bagi mereka - mereka yang mengalami banyak kendala dan hambatan di masa pandemi ini, dana bantuan ini diharapkan bisa membantu untuk menopang perekonomian keluarga. Sejak diberlakukan lockdown yangmana diharapkan menjadi penanganan kasus covid-19 yang efektif namun malah menjadi masalah bagi ekonomi sosial masarakat. Dampak dari adanya kebijakan lockdown ini adalah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Para pedagang, buruh serabutan, tukang ojek online mereka hidup dari hari ke hari dengan mengandalkan omzet dan pendapatan harian mereka. Penyaluran dana bantuan yang tepat sasaran mengkontribusikan hasil yang baik bagi kinerja pemerintah, namun apabila tidak

akan berdampak tidak efektifnya pemerintah dalam realisasi dana bantuan yang telah dianggarkan.

Kesejahteraan Sosial adalah dengan diadakannya bantuan sosial yang dimana jaminan sosial dapat diartikan sebagai pemberian uang atau pelayanan sosial untuk melindungi seseorang dari tidak memiliki maupun kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, pengangguran, kecacatan, kematian, dan juga masa tua. Bentuk dari bantuan sosial sendiri tidaklah harus berbentuk uang yang harus diberikan namun dapat juga berupa barang atau jasa yang dimana adanya pelayanan sosial. Upaya mengatasi kemiskinan secara makro ekonomi dapat dilakukan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada tingkat tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi akan mendorong perekonomian dengan terciptanya lapangan kerja, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut pemaparan Dinas Sosial Kota Batu yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu kesulitan yang menghambat, atau gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat pula terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya secara memadai. Dalam kasus ini, hampir rata-rata masyarakat Indonesia khususnya di Gorontalo terdampak covid-19 yangmana mayoritas pekerjaan masyarakat di Gorontalo adalah petani, menurunnya minat beli karena adanya pembatasan akses mengakibatkan siklus perekonomian tidak berjalan dengan baik sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun. Pemerintah sudah mengupayakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, melalui usaha ekonomi produktif, Kelompok Usaha Bersama (Kube), program keluarga harapan (PKH), BPNT, rumah tinggal layak huni (Rutilahu), lumbung ekonomi desa, rumah kita, dan kartu elektronik yang diterbitkan oleh lembaga perbankan (BRI dan BNI), terakhir program pengentasan kemiskinan diluncurkan dalam program warong elektronik (e-warong), merupakan program bantuan dari Kementerian sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin secara non-tunai.

Penyaluran dana yang tidak efektif artinya terdapat berbagai kendala yang mengiringi pelaksanaannya selama ini mulai dari kucuran dana yang di berikan kemudian informasi kepada masyarakat, sasaran penyaluran sampai dengan tahap selesainya program yang di anggap masih belum maksimal dan masih terdapat kelemahan. Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan nya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Capaian tujuan efektif dan tidaknya jalannya suatu program dapat dinilai dengan bentuk realisasinya, dengan karakteristik sebagai berikut; (a) kejelasan tujuan yang dicapai, (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, (c) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, (d) perencanaan yang matang, (e) evaluasi data

rincian suatu perencanaan, (f) tersedianya sarana dan prasarana kerja, (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, (h) sistem pengawasan dan pengendalian. Pencapaian tujuan tidak akan berhasil apabila tidak adanya prinsip yang sejalan didalam suatu organisasi. Untuk realisasi penyaluran dana bantuan sosial cenderung lebih sulit karena di tingkat prosedur pendataan dilakukan sangat cepat dalam waktu yang singkat, sehingga informasi belum tersebar luas tentang adanya dana bantuan sosial yang akan disalurkan ke masyarakat dengan syarat – syarat sesuai kriteria penerimanya.

METODOLOGI

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer karena penelitian deskriptif kualitatif menerjemahkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, koneksi antar variabel yang terjadi serta munculnya fakta yang ada serta akibatnya kepada lingkungan. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dari para informan sesuai skrip wawancara yang telah disusun oleh peneliti dan akan dianalisis sesuai konsep teori yang menjadi standar ketetapan dalam penelitian ini. Adapun standar kriteria dalam menentukan kelayakan penerimaan dana bantuan sosial tersebut disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas sosial provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini, data yang menjadi objek analisis adalah data hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang prosedur atas tata laksana survey yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kriteria masyarakat yang layak untuk menerima dana bantuan sosial terdampak covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dalam masyarakat. Situasi seperti ini mendorong munculnya urgensi untuk memperbaiki sistem bansos secara menyeluruh. Pembuat kebijakan pun dituntut untuk merespons gejolak sosial dalam masyarakat dengan cepat. Kedua hal tersebut hanya bisa dicapai jika ada mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan aktor-aktor terkait di berbagai lapisan pemerintahan. Kebutuhan akan pembaruan sistem bansos dapat dilihat dari berbagai permasalahan terkait pendataan dan penyaluran bansos selama pandemi. Hasil pemantauan media massa nasional dan media massa lokal khususnya di provinsi Gorontalo, menunjukkan setidaknya dua masalah utama. Masalah pertama adalah kurangnya koordinasi dan kejelasan mekanisme penyaluran bansos, sementara masalah kedua adalah ketidakakuratan data penerima bansos.

Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari

masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. (CNBC, 2020) Beliau mengatakan bahwa setiap Kementrian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Ketidaksinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat. Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan.

Keputusan pemerintah tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus deseas (COVID-19) sesuai yang diatur dalam Kepmensos No.54-HUK-2020 menjadi angin segar bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang terdampak akibat wabah yang melanda masyarakat saat ini. Tidak dipungkiri program penyaluran dana bansos ini mengalami berbagai polemik yang hinggat saat ini masih menjadi berita hangat di media masa dan media sosial. Prosedur dan penyelenggaraan penyaluran dana bantuan sosial dalam penanganan kasus covid-19 di provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang di atur dalam Kepmensos No.54-HUK-2020. Kondisi yang ditemukan di lapangan yaitu (1) Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. (2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW. Namun ada kemungkinan pihak RT/RW lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak covid-19, dan warga yang terdampak pun tidak melaporkan data mereka ke pihak RT/RW. (3) Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Contohnya ketika dulu terdata sebagai penerima bantuan namun seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan memiliki perubahan tingkat ekonomi dari yang tidak mampu menjadi mampu tetapi tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada pihak RT/RW atau kewilayahan sehingga masih terdata sebagai warga tidak mampu yang harus mendapat bantuan sedangkan warga yang dulunya mampu namun sekarang terdampak covid-19 tidak melaporkan datanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. (4) Permasalahan lain, sangat kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang memang banyak sekali jenisnya. Sehingga dimasyarakat sering terdengar keluhan kenapa mereka dan tetangganya mendapatkan nilai atau bentuk bantuan yang berbeda padahal mereka merasa memiliki kesulitan yang sama. Disinilah perlunya penyampaian informasi yang

lengkap, jelas dan lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat tersendatnya penyaluran bantuan sosial. Dalam menghadapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bansos Sembako, Bansos Sosial Tunai, Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Prakerja, Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako.

Pembahasan

Program bansos yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini untuk penanganan kasus covid-19 kendala yang ditemukan masih sama, masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes. Kekeliruan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Karena kita sekarang ini sedang dalam keadaan darurat dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Namun demikian, ada beberapa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan penyaluran bansos COVID-19. Pertama, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme selfreporting bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama start-up yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan. Kedua, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan bila perlu, bantuan sosial diubah menjadi tidak kondisional. Keempat, diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya. Kelima, sebagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berada di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Pemerintah Daerah, sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) diperlukan. Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi-stakeholder.

SIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang transparansi sistem dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Program bantuan sosial yang pemerintah lakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19,

antara lain bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sosial tunai, pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, dan penambahan peserta program keluarga harapan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap literatur, berita dan informasi terkait permasalahan penyaluran bantuan sosial di masa pandemic COVID-19, inti dari semua permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial tersebut adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial. Di masa pandemi ini, semua bantuan sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan seringkali tidak akurat sehingga menyebabkan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan. Ketidakandalan basis data merupakan faktor utama permasalahan pendistribusian bantuan sosial pemerintah di saat pandemi Covid-19. Diketahui dari pembahasan sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui secara masif pada tahun 2015. Padahal jika mengacu pada Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berkenaan pengurusan masyarakat pra sejahtera, dijelaskan semestinya verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Bukan tanpa alasan DTKS harus selalu dimutakhirkan secara rutin. Mengingat peran dan fungsi DTKS selaku rujukan utama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus kepada petugas kewilayahan dan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yang penting dalam suksesnya penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID19.

Referensi:

- Andari, S. (2017). Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(4), 427-438.
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 98-115.
- Haryanto. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG): *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2).
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH*, 4(1).
- Murti, A. C., & Pinem, A. P. R. (2020). Perancangan Sistem Pemetaan Bantuan Sosial Berbasis Web Responsive. *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, 1(2), 49-54.
- Negara, T. A. S. (2014). Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah. *Rechtidee*, 9(2), 154-168.
- Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1-8.
- Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas

Sosial Kota Batu). Respon Publik, 14(4), 1-7.

Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform, 2(1), 74-87.

www.60dtk.com. Ini Jenis Bantuan Bagi Warga Terdampak Covid 19 di Gorontalo: <https://60dtk.com/ini-jenis-bantuan-bagi-warga-terdampak-covid-19-di-gorontalo/>

www.katadata.co.id. Ragam Masalah Penyaluran Bansos Covid-19 yang Jadi Sorotan Jokowi:

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5eff37fe0ff80/ragam-masalah-penyaluran-bansos-covid-19-yang-jadi-sorotan-jokowi>

www.kompas.com. Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/08153581/penyaluran-bansos-bagi-warga-terdampak-covid-19-masih-jadi-persoalan?page=all>.

www.afidburhanuddin.wordpress. (2013). Metodologi Penelitian Populasi Sampel: <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/populasi-dan-sampel-2/>